

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap pola hidup dan cara berpikir masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan perluasan pembangunan suatu daerah telah mendorong peningkatan aktivitas penduduk (Lawotjo, 2013). Meningkatnya aktivitas dan konsumsi penduduk suatu daerah berpengaruh pada lingkungan hidup. Salah satu permasalahan yang terjadi ialah peningkatan volume sampah khususnya dari rumah tangga. Permasalahan ini menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan persampahan berkelanjutan (JICA, 2005).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah, yaitu dari paradigma kumpul – angkut – buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Kegiatan pengurangan sampah bertujuan supaya seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas, melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram (Kementerian Lingkungan Hidup, 2011)

Kecamatan Kepanjen sebagai daerah yang terus mengalami perkembangan juga tidak terlepas dari permasalahan persampahan. Pertumbuhan Kecamatan Kepanjen sebagai daerah perkotaan memberikan pengaruh terhadap desa atau kelurahan yang ada (RDTR Kecamatan Kepanjen, 2012). Hal ini meningkatkan aktivitas masyarakat diberbagai sektor baik sektor perumahan maupun industri/perdagangan yang berdampak pada peningkatan produksi sampah (UNEP, 2006). Fokus utamanya ialah pengelolaan persampahan. Besarnya timbunan sampah yang dihasilkan dan pengelolaan persampahan yang masih tradisional, apabila tidak teratasi dengan optimal maka menyebabkan berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung (Wibowo & Djajawinata, 2002). Dampak langsung yang dirasakan penduduk ialah terserang penyakit sedangkan dampak tidak langsung ialah menurunnya kualitas lingkungan jangka panjang maupun jangka pendek. Pengelolaan Sampah sebaiknya melibatkan

masyarakat sebagai penghasil sampah. Salah satu bentuk pengelolaan persampahan berbasis masyarakat ialah program bank sampah (Kementrian Lingkungan Hidup, 2012). Bank sampah merupakan konsep pemanfaatan sampah anorganik yang berasal dari rumah tangga, perusahaan, maupun publik yang dikemudian diinvestasikan dalam bentuk deposit tabungan sehingga memberikan keuntungan materi bagi nasabahnya (Suwerda, 2012). Implementasi bank sampah banyak ditemukan pada daerah-daerah di Indonesia khususnya daerah yang memiliki potensi dan masalah dalam pengelolaan persampahan (Permanansari & Damanhuri, 2011). Bank sampah gemah ripah di Kabupaten Bantul dan Bank sampah di Kota Malang merupakan contoh bank sampah yang sukses dalam membina masyarakat dalam mengelola persampahan. Mulai dari bentuk fisik sampai pada manajemen bank sampah telah sesuai dengan Permen LH No. 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse, and recycle* melalui bank sampah.

Kecamatan Kepanjen telah melaksanakan program bank sampah sejak tahun 2009 di TPA Talangagung (RDTR Kecamatan Kepanjen, 2012). Akan tetapi program bank sampah yang ada di TPA Talangagung tidak sesuai dengan kriteria dan indikator bank sampah yang ditetapkan oleh pemerintah maupun studi kasus. Kegiatan bank sampah di TPA Talangagung hanya berupa pemilahan sampah anorganik dan organik di zona aktif pada tempat pengumpulan akhir (TPA). Proses tersebut dilakukan oleh masyarakat desa Talangagung yang berjumlah 11 orang. Kesebelas masyarakat tersebut berperan sebagai pemulung yang memilah sampah anorganik untuk dijual kembali kepada para pengepul (Survei Pendahuluan, 2013). Peran Pemulung di TPA dapat mengurangi jumlah sampah khususnya anorganik hingga 7,5% untuk plastik dan 12,8% untuk kertas (Meidiana & Gamse, 2012). Namun, peran pemulung di TPA Talangagung tidak sesuai dengan konsep bank sampah karena pada prinsipnya bank sampah harus melibatkan masyarakat umum dan lokasinya mendekati sumber sampah (Kementrian Lingkungan Hidup, 2012).

Saat ini, kegiatan bank sampah di Kecamatan Kepanjen belum memiliki dua kriteria tersebut. Program bank sampah yang diterapkan di Kecamatan Kepanjen belum optimal baik secara fisik, manajemen bank sampah, dan keterlibatan masyarakat. Permasalahan ini akan berdampak pada keberlanjutan program tersebut sebagai solusi pengelolaan sampah berkelanjutan di Kecamatan Kepanjen. Salah satu indikator penting dalam implementasi suatu program/kebijakan yang dilakukan pemerintah khususnya pengelolaan sampah ialah adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini akan

menjadi kunci keberhasilan setiap program pengelolaan persampahan (Alfiandra, 2009). Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bank sampah di TPA Talangagung dan menyusun skenario pengembangan bank sampah yang tepat di Kecamatan Kepanjen. Kedua bank sampah di Kota Malang dan Kabupaten Bantul tersebut dijadikan sebagai *best practice* untuk pengembangan bank sampah di Kecamatan Kepanjen, dikarenakan adanya kesamaan karakteristik masyarakat baik secara geografis maupun sosial masyarakat.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi permasalahan terkait dengan skenario pengembangan bank sampah di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ialah sebagai berikut :

1. Adanya potensi sampah anorganik khususnya kertas dan plastik yang bernilai ekonomi namun tidak dimanfaatkan oleh rumah tangga.
2. Kegiatan bank sampah di TPA Talangagung hanya dilakukan oleh pemulung sedangkan program bank sampah didasari oleh adanya partisipasi/keterlibatan seluruh lapisan masyarakat termasuk rumah tangga (Kementrian Lingkungan Hidup, 2012)
3. Kegiatan pengelolaan persampahan masih bersifat tradisional seperti pembakaran sampah, penimbunan sampah secara illegal, dan pembuangan sampah ke sungai atau selokan yang berdampak pada pencemaran air tidak. Hal ini tidak sesuai dengan program pengelolaan sampah berkelanjutan seperti bank sampah (RDTR Kecamatan Kepanjen, 2012)
4. Bank sampah di TPA Talangagung tidak sesuai dengan konsep Permen LH No. 13 Tahun 2012 ditinjau dari aspek fisik, manajemen, dan pelaksana.

## 1.3 Rumusan Masalah

Dasar perumusan masalah penelitian yaitu belum optimalnya keterlibatan masyarakat, pelaksanaan program bank sampah, dan permasalahan persampahan yang bersifat tradisional. Adapun penjabaran dari dasar perumusan masalah diatas adalah:

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat skala rumah tangga terhadap pengembangan bank sampah?
2. Bagaimanakah skenario pengembangan bank sampah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang?

## 1.4 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat skala rumah tangga terhadap pengembangan bank sampah
2. Menentukan skenario pengembangan bank sampah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

## 1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

### 1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberi batasan terhadap pembahasan masalah sehingga penelitian ini dapat terarah dan mencapai sasaran. Lingkup materi yang terdapat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Karakteristik pengelolaan dan permasalahan persampahan yang ada di Kecamatan Kepanjen
2. Implementasi program bank sampah yang diterapkan di TPA Talangagung, Kecamatan Kepanjen
3. Partisipasi masyarakat skala rumah tangga dalam kegiatan suatu kelembagaan yang ada di Kecamatan Kepanjen
4. Persepsi dan kemauan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan persampahan melalui bank sampah
5. Studi kasus program bank sampah lain sebagai pertimbangan dan masukan dalam skenario pengembangan bank sampah di Kecamatan Kepanjen
6. Skenario pengembangan bank sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

### 1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu Kecamatan Kepanjen. Wilayah ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Malang yang memiliki batas administrasi sebagai berikut:

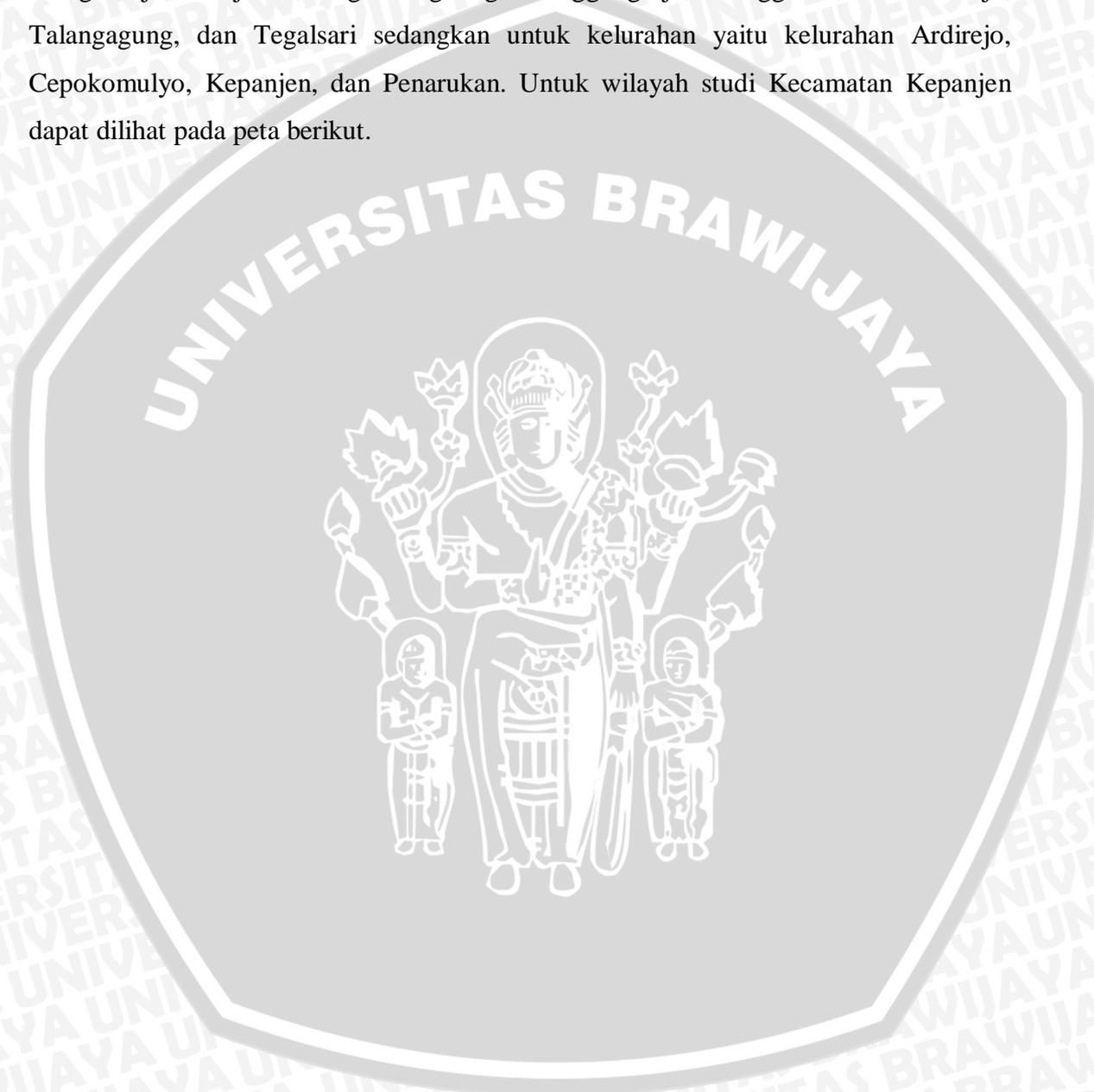
Sebelah Utara : Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Ngajum

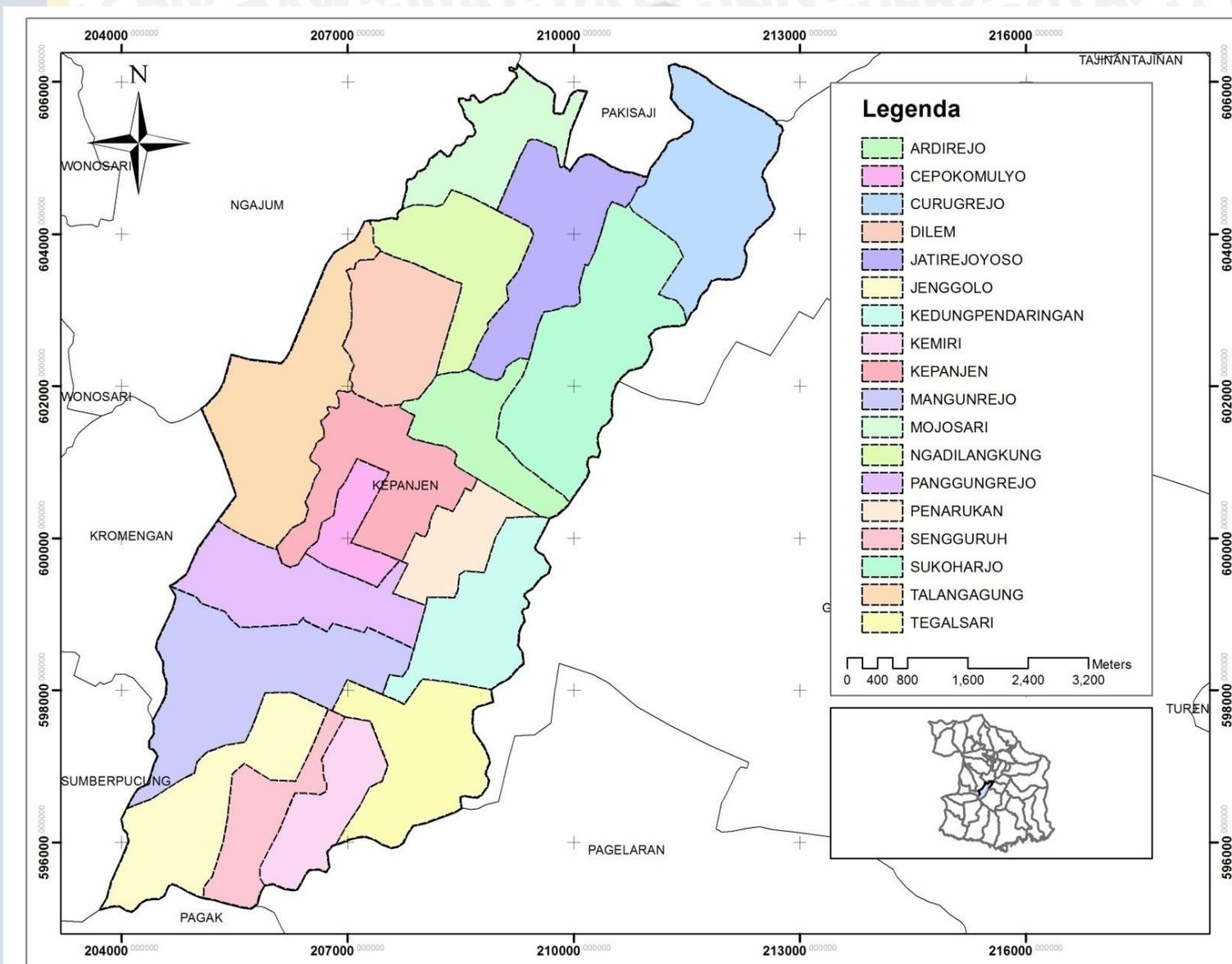
Sebelah Selatan : Kecamatan Pagak dan Kecamatan Pagelaran

Sebelah Barat : Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum, dan Kecamatan Sumberpucung

Sebelah Timur : Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Bululawang

Kecamatan Kepanjen terletak di sebelah selatan Kota Malang dengan jarak  $\pm 18$  km. Kecamatan Kepanjen memiliki luas 4.624 Ha yang terletak pada titik koordinat  $112^{\circ}17'10,9'' - 112^{\circ}57'00''$  Bujur Timur dan  $55,11'' - 8^{\circ}26'34,45''$  Lintang Selatan. Wilayah Kecamatan Kepanjen secara administratif dibagi menjadi 14 desa dan empat kelurahan yaitu desa Curungrejo, Jatirejoyoso, Jenggolo, Kedung Pedaringan, Kemiri, Mangunrejo, Mojosari, Ngadilankung, Panggungrejo, Sengguruh, Sukoraharjo, Talangagung, dan Tegalsari sedangkan untuk kelurahan yaitu kelurahan Ardirejo, Cepokomulyo, Kepanjen, dan Penarukan. Untuk wilayah studi Kecamatan Kepanjen dapat dilihat pada peta berikut.

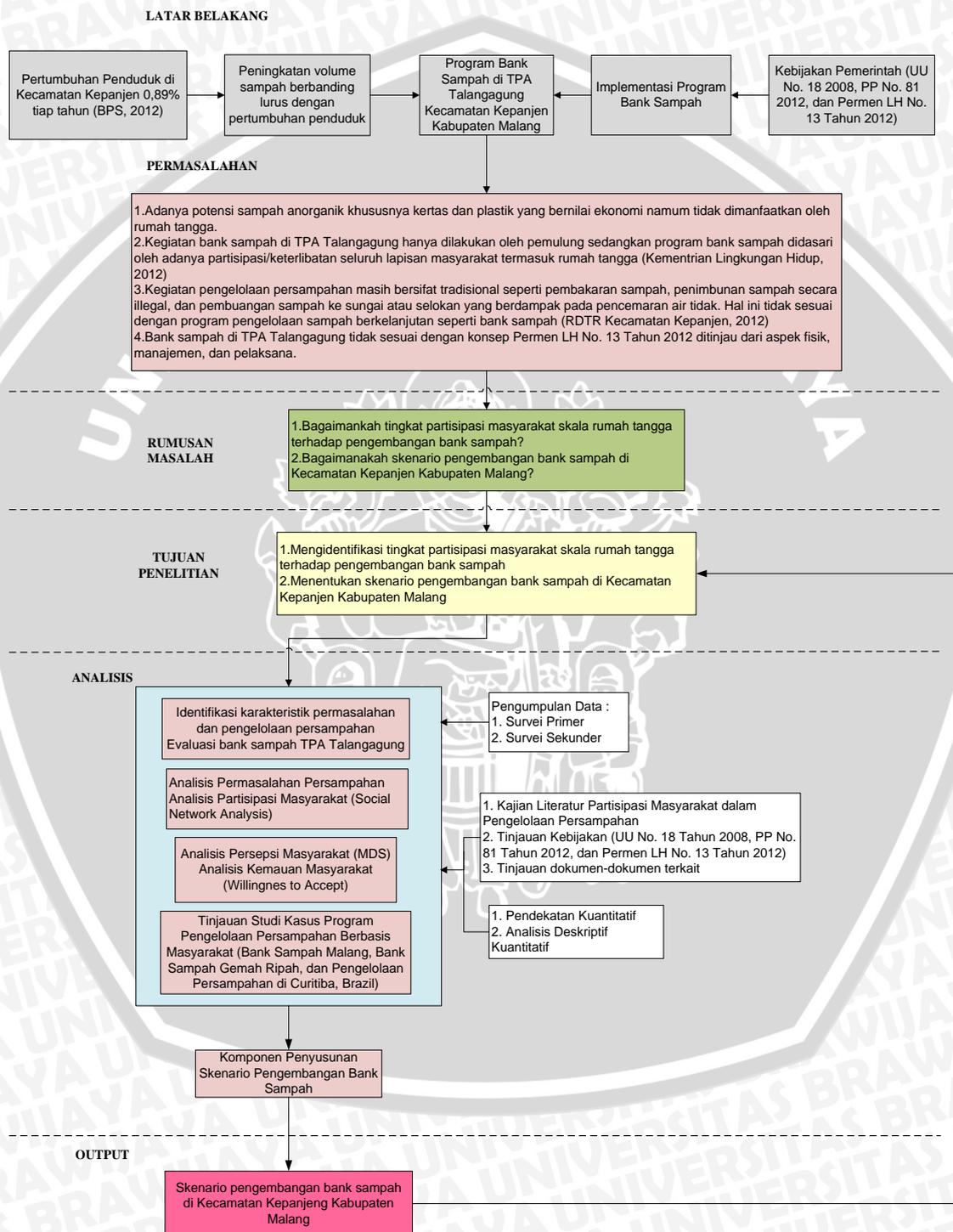




Gambar 1. 1 Peta Kecamatan Kapanjen

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini merupakan ringkasan dari tahapan-tahapan pemikiran yang dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ada hingga menemukan penyelesaiannya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu :



Gambar 1. 2 Kerangka pemikiran

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menjelaskan tentang urutan dan isi setiap bab dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang mencakup ruang lingkup wilayah, ruang lingkup materi, serta pembuatan kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Berisi tentang literatur yang menjadi acuan dalam pengumpulan data, analisis data, penelitian sejenis yang menjadi penunjang penelitian, dan serta kerangka teori yang dibuat untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan pengaplikasian tiap-tiap teori yang dijadikan acuan dalam menganalisis tiap permasalahan.

### **BAB III Metode Penelitian**

Berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian yang dimulai dari jenis penelitian, diagram alir penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan desain survei yang berfungsi sebagai pedoman penelitian. Metode penelitian merupakan bab yang akan menggambarkan teknik analisa yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan kajian terkait objek penelitian yang diambil.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Berisi tentang data yang diperoleh dari survei primer dan survei sekunder, analisis data dan arahan yang dihasilkan dari analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Pada bab ini akan diperoleh hasil dari pembahasan yang dilakukan pada penelitian sehingga memberikan gambaran tentang objek yang telah diteliti untuk dapat dibuat arahan dan rekomendasi terhadap penelitian.

### **BAB V Penutup**

Berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian dan temuan baru dari hasil analisis. Selain itu, peneliti juga akan memberikan saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait skenario pengembangan bank sampah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

### 1.8 Manfaat Penelitian

Hasil studi mengenai skenario pengembangan bank sampah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Bagi peneliti, sebagai suatu kajian ilmiah dalam menerapkan ilmu perencanaan wilayah dan kota dalam praktek sesungguhnya, khususnya dalam pengembangan bank sampah sebagai salah satu infrastruktur di perkotaan maupun pedesaan. Program bank sampah akan menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan persampahan secara global. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengembangan bank di seluruh wilayah Indonesia
2. Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi untuk melakukan studi mengenai pengembangan program-program pengelolaan persampahan di perkotaan maupun pedesaan melalui keterlibatan masyarakat daerah-daerah lain di Indonesia dengan karakteristik yang hampir sama.
3. Bagi pemerintah dan pelaku pembangunan, sebagai informasi sebagai bahan pertimbangan pembangunan dalam kaitannya terhadap arahan pengembangan program pengelolaan persampahan seperti bank sampah sebagai solusi global. Selain itu akan memberikan masukan kepada pemerintah dalam peningkatan pembangunan infrastruktur pengelolaan persampahan didaerahnya masing-masing.
4. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi dan edukasi terkait pemberdayaan masyarakat mandiri dalam pengembangan bank sampah. Bank sampah akan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di masyarakat. Selain itu penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya perilaku dan kesadaran untuk melakukan pencegahan terhadap peningkatan volume sampah pengelolaan persampahan yang bersifat tradisional.